

FILSAFAT SEJARAH KRITIS: POST-MODERNISME

Bahrún Ario Johan¹, Afida², Vita Lukviana Wati³, Dias Indriyani Soleha Saputri⁴, Elisabeth Berek Ola Liwun⁵, Arif Wahyu Hidayat⁶

1,2,3,4,5 Universitas Insan Budi Utomo

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juli 2025

Available online Juli 2025

Kata kunci: Filsafat sejarah, Narasi besar, Postmodernisme



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Tulisan ini membahas hubungan antara filsafat sejarah kritis dan postmodernisme, khususnya melalui kontribusi pemikiran Jean-François Lyotard. Filsafat sejarah kritis menolak narasi sejarah tunggal yang dominan, dan menyoroti peran kekuasaan dalam konstruksi historiografi. Sementara itu, postmodernisme mempertanyakan legitimasi narasi besar seperti kemajuan dan emansipasi, serta menekankan pluralitas dan relativitas kebenaran sejarah. Dengan pendekatan hermeneutik kritis dan studi pustaka, penelitian ini menunjukkan bahwa keduanya membuka ruang bagi narasi alternatif, suara marjinal, serta refleksi etis dalam penulisan sejarah. Hasilnya, sejarah dipahami bukan sebagai fakta objektif, tetapi sebagai medan wacana yang kompleks, terbuka, dan penuh dinamika.

PENDAHULUAN

Filsafat sejarah merupakan cabang filsafat yang secara khusus berupaya memahami hakikat sejarah, baik dari segi makna, struktur, maupun tujuan dari keseluruhan perjalanan umat manusia di dunia. Ia tidak sekadar merefleksikan kronologi peristiwa masa lalu, melainkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang apakah sejarah memiliki arah tertentu, apakah terdapat hukum atau pola tetap dalam sejarah, dan bagaimana manusia dapat mengetahui serta menafsirkan kejadian-kejadian historis. Dengan kata lain, filsafat sejarah mencoba melihat lebih dalam dari sekadar apa yang terjadi, kepada mengapa dan bagaimana hal itu terjadi dalam kerangka pemahaman filosofis. Sejak zaman Aufklärung (Pencerahan) hingga era modern, filsafat sejarah banyak dipengaruhi oleh keyakinan akan rasionalitas manusia dan kemajuan. Pemikir seperti Hegel melihat sejarah sebagai progres menuju kebebasan, sebuah proses dialektis yang memiliki arah dan tujuan tertentu. Namun, keyakinan ini tidak selamanya bertahan tanpa tantangan. Di abad ke-20, muncul beragam kritik terhadap pendekatan modernis terhadap sejarah, terutama karena pendekatan tersebut seringkali mengklaim objektivitas dan universalitas, sementara dalam praktiknya tidak jarang

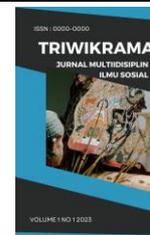


menyisihkan pengalaman-pengalaman alternatif dan suara-suara marjinal. Perkembangan ini mencapai titik penting ketika muncul arus pemikiran postmodernisme yang membawa pendekatan baru terhadap realitas, termasuk terhadap sejarah. Jean-François Lyotard, seorang tokoh penting dalam postmodernisme, dalam karyanya yang berjudul *La Condition Postmoderne* (1979), menantang legitimasi narasi besar seperti kemajuan, pencerahan, dan emansipasi yang menjadi landasan bagi filsafat sejarah modern. Bagi Lyotard, dunia postmodern ditandai oleh “ketidakpercayaan terhadap narasi besar.” Ia menegaskan bahwa sejarah bukanlah sebuah alur tunggal yang koheren, melainkan ruang bagi pluralitas narasi yang saling bersaing, sering kali kontradiktif, dan ditulis dari berbagai posisi sosial dan ideologis.

Dalam konteks inilah filsafat sejarah kritis mendapatkan relevansinya. Sebagai pendekatan yang menyadari adanya relasi kuasa dalam penulisan sejarah, filsafat sejarah kritis tidak menerima begitu saja narasi sejarah dominan sebagai kebenaran absolut. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya dekonstruksi, analisis ideologis, dan keterbukaan terhadap interpretasi yang beragam. Sejarah dipahami sebagai konstruksi sosial dan budaya, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai, bahasa, dan kekuasaan. Melalui pendekatan ini, sejarah tidak dilihat sebagai cermin objektif dari kenyataan masa lalu, tetapi sebagai medan wacana yang penuh dengan kontestasi makna. Oleh karena itu, pertemuan antara filsafat sejarah kritis dan postmodernisme membuka ruang refleksi yang luas mengenai bagaimana sejarah harus dipahami, ditulis, dan diajarkan di era kontemporer. Ia mengajak kita untuk waspada terhadap klaim-klaim kebenaran tunggal dan membuka diri terhadap kompleksitas pengalaman manusia yang beragam. Dalam dunia yang semakin plural dan majemuk, pendekatan ini tidak hanya memberikan cara pandang yang lebih adil terhadap sejarah, tetapi juga memperkuat kesadaran akan pentingnya inklusivitas, etika, dan tanggung jawab dalam memahami masa lalu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Data dikumpulkan melalui telaah terhadap literatur primer dan sekunder yang relevan, seperti karya-karya Jean-François Lyotard (khususnya *La Condition Postmoderne*), serta pemikiran filsuf postmodern lain seperti Michel Foucault dan Jacques Derrida. Selain itu, referensi dari filsuf sejarah modern seperti Hegel digunakan sebagai



pembandingan. Analisis dilakukan dengan pendekatan hermeneutik kritis, yaitu membaca dan menafsirkan teks-teks filsafat secara kontekstual untuk menggali makna, relasi kuasa, serta ide-ide dekonstruktif yang mempengaruhi narasi sejarah. Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami bagaimana postmodernisme dan filsafat sejarah kritis saling berkontribusi dalam mendekonstruksi narasi besar dan membuka ruang bagi narasi alternatif dalam historiografi kontemporer.

PEMBAHASAN

A. Postmodernisme dan Kritik terhadap Narasi Besar

Salah satu karakter utama dari pemikiran postmodern adalah penolakan terhadap apa yang disebut Jean-François Lyotard sebagai narasi besar (*grand narratives*). Dalam bukunya yang terkenal *La Condition Postmoderne* (1979), Lyotard menyatakan bahwa zaman postmodern ditandai oleh *incredulity toward metanarratives*, yakni ketidakpercayaan terhadap narasi besar yang selama ini menjadi fondasi legitimasi bagi ilmu pengetahuan, politik, dan sejarah. Narasi besar dalam konteks sejarah merujuk pada pemahaman bahwa sejarah manusia memiliki arah dan makna yang universal, rasional, dan progresif. Contohnya adalah gagasan bahwa sejarah adalah perjalanan menuju kemajuan, kebebasan, atau emansipasi umat manusia, sebagaimana terlihat dalam pemikiran para filsuf modern seperti Hegel, Comte, atau Marx. Dalam narasi-narasi ini, sejarah seolah-olah bergerak dalam jalur tunggal yang linier dan deterministik, di mana masa depan dapat diprediksi sebagai kelanjutan dari hukum atau logika yang bersifat universal. Postmodernisme menolak pandangan tersebut. Bagi para pemikir postmodern, sejarah tidak memiliki satu arah pasti atau satu makna tunggal. Sejarah terdiri dari berbagai narasi kecil (*petit récits*) yang bersifat lokal, partikular, dan terikat konteks sosial serta kultural yang spesifik. Narasi kecil ini sering kali tidak selaras, bahkan saling bertentangan, sehingga tidak mungkin disatukan dalam satu kerangka besar yang komprehensif. Lebih dari itu, postmodernisme juga menunjukkan bahwa klaim atas objektivitas dan netralitas dalam historiografi modern sebenarnya merupakan bentuk dominasi epistemologis. Narasi sejarah yang dianggap “resmi” sering kali ditulis oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan negara, kolonial, lembaga agama, atau elite politik dan cenderung mengabaikan atau menindas suara kelompok-kelompok lain seperti perempuan, masyarakat adat, buruh, atau kaum minoritas. Oleh karena itu, penolakan terhadap narasi besar juga merupakan upaya untuk memberi ruang



bagi keragaman suara dan pengalaman historis yang selama ini termarjinalkan. Dalam kerangka ini, postmodernisme mengajak kita untuk bersikap skeptis terhadap klaim-klaim universalitas dalam sejarah dan lebih menekankan pentingnya konteks, perbedaan, dan pluralitas. Sejarah tidak lagi dipahami sebagai kisah tunggal umat manusia, melainkan sebagai kumpulan kisah-kisah yang terus bersaing dan dipertanyakan kembali dari waktu ke waktu.

B. Filsafat Sejarah Kritis: Membaca Ulang Sejarah

Jika postmodernisme mengajukan kritik epistemologis terhadap narasi besar, maka filsafat sejarah kritis melangkah lebih jauh dengan membongkar fondasi ideologis dan relasi kuasa yang membentuk penulisan sejarah. Pendekatan ini tidak hanya mempertanyakan “apa yang diceritakan dalam sejarah”, tetapi juga “siapa yang menceritakannya”, “untuk kepentingan siapa”, dan “apa yang disembunyikan atau dilupakan dalam proses penulisan tersebut”. Filsafat sejarah kritis sangat dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh seperti Michel Foucault dan Jacques Derrida. Foucault memperkenalkan konsep “arkeologi pengetahuan” dan “genealogi kekuasaan” untuk menunjukkan bahwa pengetahuan historis tidak bebas dari kuasa, tetapi justru terbentuk dalam medan kuasa. Ia menyatakan bahwa sejarah adalah hasil dari konstruksi diskursif, di mana praktik-praktik kekuasaan menentukan apa yang dianggap layak dicatat dan apa yang dihapus dari ingatan kolektif. Dengan kata lain, sejarah bukanlah cermin dari masa lalu, melainkan representasi yang penuh dengan pertarungan ideologi. Sementara itu, Derrida melalui gagasan dekonstruksinya mendorong pembacaan ulang terhadap teks-teks sejarah yang selama ini dianggap stabil dan bermakna tunggal. Dekonstruksi menolak struktur oposisi biner (misalnya: pemenang vs pecundang, pusat vs pinggiran, modern vs tradisional) yang sering mendasari narasi historis. Dengan membuka ruang bagi ambiguitas, ketidakkonsistenan, dan ketidakhadiran, filsafat sejarah kritis memungkinkan kita untuk menemukan sisi-sisi tersembunyi dan makna alternatif dari sebuah peristiwa sejarah. Salah satu implikasi penting dari filsafat sejarah kritis adalah perlunya membaca ulang sejarah secara berkelanjutan. Sejarah tidak boleh dipahami sebagai sesuatu yang sudah selesai dan tertutup, melainkan sebagai medan interpretasi yang terus terbuka terhadap revisi, pembacaan ulang, dan kritik. Sejarah yang mapan, yang diajarkan di sekolah atau dilegitimasi oleh negara, harus terus-menerus diuji, dibandingkan dengan sumber lain, dan dibuka terhadap suara yang selama ini dibungkam. Inilah yang membuat filsafat sejarah kritis sangat relevan dalam konteks



perjuangan keadilan historis, rekonsiliasi, dan pembentukan memori kolektif yang inklusif. Dengan demikian, filsafat sejarah kritis dan postmodernisme memiliki titik temu dalam hal penolakan terhadap absolutisme historis. Keduanya mengajak kita untuk memahami sejarah bukan sebagai narasi objektif dan final, tetapi sebagai arena interpretatif yang kaya, kompleks, dan penuh dinamika kuasa. Dalam dunia yang terus berubah dan penuh konflik identitas serta kepentingan, pendekatan semacam ini menjadi penting agar sejarah tidak menjadi alat dominasi, melainkan sarana refleksi kritis dan emansipasi.

C. Kontribusi Postmodernisme dalam Filsafat Sejarah

Postmodernisme memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam menggeser paradigma dalam filsafat sejarah, terutama melalui kritiknya terhadap klaim kebenaran tunggal dan objektivitas historis. Dalam kerangka postmodern, sejarah tidak lagi dipandang sebagai cermin yang merefleksikan secara netral kenyataan masa lalu, melainkan sebagai suatu konstruksi—hasil dari narasi-narasi yang dibentuk oleh bahasa, kekuasaan, ideologi, dan kepentingan tertentu. Pandangan ini mengubah posisi sejarawan secara radikal. Sejarawan tidak lagi dianggap sebagai pencatat atau penutur fakta-fakta objektif yang dapat diverifikasi secara ilmiah dan netral, melainkan sebagai subjek yang terlibat secara aktif dalam proses konstruksi makna. Dengan kata lain, tulisan sejarah tidak pernah bebas nilai. Setiap keputusan tentang apa yang dicatat, apa yang diabaikan, bagaimana suatu peristiwa diceritakan, serta bahasa yang digunakan, mencerminkan posisi ideologis, latar sosial, dan bias tertentu dari si penulis sejarah. Konsep ini membuka ruang bagi kesadaran reflektif dalam praktik historiografi. Penulisan sejarah bukan lagi sekadar akumulasi data masa lalu, tetapi juga merupakan kegiatan interpretatif yang sarat makna dan tanggung jawab etis. Sejarawan dalam kerangka postmodern harus menyadari bahwa mereka bukan hanya menyusun informasi, tetapi juga membentuk pemahaman masyarakat tentang masa lalu, dengan demikian, berkontribusi pada pembentukan identitas kolektif, legitimasi kekuasaan, serta arah masa depan. Kontribusi postmodernisme ini berjalan seiring dengan semangat filsafat sejarah kritis, yang juga mengajak kita untuk mempertanyakan asumsi-asumsi dasar dari narasi historis dan membuka diri terhadap kemungkinan penafsiran ulang. Filsafat sejarah kritis mendorong adanya dialog terus-menerus antara masa lalu dan masa kini, antara yang mapan dan yang ditindas, antara yang dominan dan yang terpinggirkan. Postmodernisme juga memperkenalkan pendekatan



interdisipliner dalam studi sejarah, di mana metodologi tidak lagi bersifat tunggal dan kaku, tetapi terbuka terhadap pendekatan dari sastra, antropologi, feminisme, kajian budaya, dan lainnya. Sejarah menjadi ranah yang cair, dinamis, dan inklusif, bukan monolitik atau eksklusif. Dengan demikian, kontribusi postmodernisme dalam filsafat sejarah bukan hanya soal kritik terhadap narasi besar, tetapi juga soal pergeseran mendalam dalam cara kita memandang sejarah: dari sesuatu yang stabil dan pasti menjadi sesuatu yang terbuka, plural, dan terus dipertanyakan.

D. Implikasi Etis dan Epistemologis

Pendekatan postmodern dan filsafat sejarah kritis membawa konsekuensi yang sangat penting, tidak hanya secara epistemologis, tetapi juga secara etis. Secara epistemologis, pendekatan ini mengubah pemahaman kita tentang apa itu “pengetahuan sejarah”. Ia menolak ide bahwa sejarah adalah representasi obyektif dari realitas masa lalu, dan sebaliknya menekankan bahwa sejarah adalah produk dari interpretasi, diskursus, dan relasi kuasa. Hal ini berarti bahwa pengetahuan historis tidak dapat dilepaskan dari subyektivitas, konteks budaya, dan posisi ideologis dari pembuat narasi sejarah. Implikasi dari hal ini adalah pengakuan atas adanya multiple truths dalam sejarah. Tidak ada satu versi sejarah yang mutlak benar; yang ada adalah berbagai narasi yang saling bersaing dan saling mengklaim otoritas. Namun, daripada menyebabkan kekacauan atau nihilisme, pluralitas ini justru membuka ruang bagi demokratisasi pengetahuan. Ia mengundang kita untuk tidak hanya mendengar suara yang paling keras atau yang berasal dari pusat kekuasaan, tetapi juga memberi tempat bagi narasi-narasi yang selama ini dibungkam dan disingkirkan. Secara etis, pendekatan ini membawa misi yang kuat: memberdayakan kelompok-kelompok yang selama ini menjadi objek pasif dari sejarah untuk menjadi subjek aktif. Perempuan, kelompok miskin, masyarakat adat, kelompok etnis minoritas, orang-orang dengan disabilitas, dan kelompok-kelompok lain yang sering kali diabaikan oleh historiografi konvensional diberi ruang untuk menceritakan pengalaman mereka sendiri, dengan bahasa dan perspektif mereka sendiri. Ini bukan sekadar soal representasi, tetapi juga soal keadilan historis mengembalikan agensi kepada mereka yang telah dilupakan oleh sejarah resmi. Filsafat sejarah kritis menekankan bahwa penulisan sejarah harus dilakukan dengan kesadaran akan tanggung jawab etis terhadap siapa yang diceritakan dan bagaimana mereka diceritakan. Ini berarti menghindari generalisasi, stereotip, dan



penghapusan kompleksitas kehidupan manusia. Sejarah, dalam pandangan ini, menjadi arena dialogis di mana berbagai suara dapat berinteraksi secara kritis dan konstruktif. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang masa lalu, tetapi juga memperdalam kesadaran kita tentang pentingnya etika dalam membangun narasi. Sejarah bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga tentang siapa yang memiliki hak untuk bercerita, dan untuk tujuan apa cerita itu dibangun.

KESIMPULAN

Filsafat sejarah kritis dan postmodernisme merupakan dua pendekatan yang saling berkelindan dalam menggugat paradigma historiografi tradisional yang didasarkan pada narasi besar, objektivitas ilmiah, dan determinisme sejarah. Keduanya hadir sebagai respons terhadap berbagai krisis epistemologis dan etis dalam pemahaman kita tentang masa lalu, terutama ketika sejarah dijadikan alat legitimasi kekuasaan dan penguatan identitas kolektif yang eksklusif. Postmodernisme, terutama melalui pemikiran Jean-François Lyotard, membongkar fondasi narasi besar yang selama ini mendominasi penulisan sejarah. Dengan menyatakan ketidakpercayaan terhadap narasi besar, Lyotard menekankan bahwa setiap klaim kebenaran dalam sejarah tidaklah bersifat netral, melainkan muncul dari kepentingan tertentu. Sejarah tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial, bahasa, dan kekuasaan yang mempengaruhinya. Narasi-narasi besar tentang kemajuan, peradaban, atau emansipasi universal tidak lagi diterima begitu saja, karena sering kali menyembunyikan praktik dominasi dan pengabaian terhadap yang “lain”. Filsafat sejarah kritis mengadopsi semangat dekonstruktif ini dan melangkah lebih jauh dengan mengajukan pembacaan ulang terhadap sejarah yang telah mapan.

Dengan menggandeng pemikiran tokoh-tokoh seperti Foucault dan Derrida, pendekatan ini mengajak kita untuk melihat sejarah sebagai konstruksi ideologis yang dibentuk oleh relasi kuasa dan praktik diskursif. Dalam pendekatan kritis, sejarah dipahami sebagai medan pertarungan makna—di mana siapa yang berbicara, siapa yang dibungkam, dan bagaimana narasi dibentuk menjadi sangat penting untuk diperiksa. Secara praktis, integrasi antara postmodernisme dan filsafat sejarah kritis membawa implikasi yang luas. Ia menantang dominasi narasi tunggal dan membuka ruang bagi narasi-narasi alternatif yang sebelumnya terpinggirkan. Perempuan, masyarakat adat, kelompok minoritas, buruh, anak-anak, dan kelompok-kelompok lainnya kini diberi ruang untuk menyuarakan pengalaman historis mereka



sendiri. Dalam hal ini, sejarah menjadi proyek kolektif yang tidak selesai—sebuah mosaik naratif yang senantiasa tumbuh dan berkembang, memperkaya cara kita memahami kemanusiaan secara lebih utuh dan inklusif. Pendekatan ini juga memunculkan kesadaran baru bahwa sejarah bukan hanya persoalan masa lalu, tetapi juga berhubungan erat dengan masa kini dan masa depan. Bagaimana kita menceritakan masa lalu akan menentukan bagaimana kita membentuk identitas, menegakkan keadilan, serta membangun solidaritas dalam masyarakat yang multikultural dan penuh perbedaan.

Dengan demikian, sejarah bukan hanya milik penguasa atau lembaga akademik, melainkan milik bersama, yang harus terus diperiksa dan ditulis ulang secara kritis dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, filsafat sejarah kritis yang diperkaya oleh semangat postmodernisme tidak hanya menawarkan pendekatan baru dalam memahami sejarah, tetapi juga menjadi landasan etis untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan reflektif. Sejarah bukanlah narasi final yang tertutup, melainkan ruang terbuka untuk pertemuan, dialog, dan penyembuhan. Dalam dunia yang terus berubah dan penuh kompleksitas ini, pendekatan tersebut menjadi sangat relevan dan diperlukan.

Daftar Pustaka

- Nurhayati, I. (2008). DIMENSI SOSIOLOGIS SUFISME DALAM LINTASAN SEJARAH: Dari Asketisme Sufisme-Klasik hingga Post-Modernisme. *ISLAMICA*, 3(1), 96-106.
- Hidayat, A, M. (2019). MENIMBANG TEORI-TEORI SOSIAL POSTMODERN: SEJARAH, PEMIKIRAN, KRITIK DAN MASA DEPAN POSTMODERNISME. *Journal of Urban Sociology*, 2(1), 42-64.
- THOHIR, A., SAHIDIN, A. (2019). *FILSAFATSEJARAH: Profetik, Spekulatif, dan Kritis*. Jakarta: KENCANA.
- Setiawan, J., Sudrajat, A. (2018). PEMIKIRAN POSTMODERNISME DAPANDANGANNYA TERHADAP ILMU PENGETAHUAN. *Jurnal Filsafat*, 28(1), 26-46.
- Kustiawan, W., Multazam, I, D., Restilia, T,. (2023). Media dalam Pendekatan Pemikiran Postmodern atau Dekonstruksi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9 (2), 297-306.
- Abidin, Z, Y. (2018). *Filsafat Modern*. Jawa Barat: CV. Pustaka Setia.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial

Volume 8, Number 3, 2025 pp.109-117

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



Purwatiningsih, P, A., Adinugraha, H, H. (2018). HISTORI FILANTROPI: TINJAUAN TEORI POSTMODERN. *Jurnal Zakat dan Wakaf* , 5(1), 150-170.

Iskandar, D., Purnamasari, E., Juansah, E,D., Nulhakim, L,. (2023). POSTMODERNISME: ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN BAGI FILSAFAT DAN PENDIDIKAN. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(1), 37-42.

Miswari. (2017). Postmodernisme sebagai sofisme: Studi kritis humaniora, epistemologi dan sains pasca modern. *At-Tafkir*, 9(1), 65-84.